

## ***Implementation of E-Government Using E-Buddy Application in Incoming Mail Management in Keper Village, Krembung District, Sidoarjo Regency***

### **[Implementasi E-Government Penggunaan Aplikasi E-Buddy dalam Pengelolaan Surat Masuk di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo]**

“Kurnia Candra Dewi<sup>1)</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah<sup>\*2)</sup>”

“<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia”

“<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia”

“\*Email Penulis Korespondensi: [ilmiusrotin@umsida.ac.id](mailto:ilmiusrotin@umsida.ac.id)”

**Abstract.** *This research explores the implementation of the E-Buddy application as a digital administration system in Keper Village, Sidoarjo. The study aims to examine data infrastructure, legal foundation, institutional coordination, human resources, technology support, and leadership strategies in optimizing digital correspondence. Data collection was conducted through interviews with village officials and supported by official documents. The findings reveal that E-Buddy significantly improves the efficiency and transparency of administrative services, although challenges remain in internet stability and technical system errors. The study highlights that proper training, backup archiving, and clear coordination mechanisms contribute to the system's sustainability. The research concludes that E-Buddy plays an essential role in advancing village governance towards digital transformation.*

**Keywords -** *E-Buddy; digital governance; village administration; Sidoarjo*

**Abstrak.** *Penelitian ini membahas implementasi aplikasi E-Buddy sebagai sistem administrasi digital di Desa Keper, Sidoarjo. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji infrastruktur data, dasar hukum, koordinasi kelembagaan, sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta strategi kepemimpinan dalam mengoptimalkan surat-menyurat digital. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan perangkat desa dan didukung dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Buddy mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan administrasi, meskipun masih terdapat kendala pada stabilitas jaringan internet serta gangguan teknis sistem. Penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan, arsip cadangan, dan koordinasi yang jelas berperan penting dalam keberlanjutan sistem. Kesimpulan penelitian menekankan peran vital E-Buddy dalam mendorong tata kelola desa menuju transformasi digital.*

**Kata Kunci -** *E-Buddy; tata kelola digital; administrasi desa; Sidoarjo*

## **I. PENDAHULUAN**

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terjadi dengan sangat cepat dan membawa pengaruh besar pada berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan. Teknologi memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik dan informasi yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat serta mempercepat proses administrasi. Selain itu, penggunaan inovasi digital mendorong instansi pemerintah bekerja lebih efisien dalam operasional sehari-hari dan lebih efektif dalam pengelolaan administrasi. Penerapan teknologi ini juga meningkatkan transparansi, meminimalkan birokrasi, serta mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja. Dampak positif lainnya adalah terciptanya komunikasi yang lebih cepat antara pemerintah dan masyarakat, serta kemudahan dalam dokumentasi dan arsip digital. Dengan demikian, adopsi teknologi informasi menjadi kunci utama dalam modernisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan [1].

Setiap instansi pemerintah maupun swasta tidak dapat dipisahkan dari kegiatan administrasi. Hal ini disebabkan administrasi menjadi bagian penting yang selalu hadir dalam berbagai pekerjaan atau kegiatan organisasi. Administrasi atau tata usaha merupakan bagian keseluruhan dari proses administrasi [2] Administrasi memiliki peran penting karena dapat mendukung dan mempermudah berbagai urusan dalam organisasi, terutama dalam pengelolaan surat menyurat termasuk pengarsipan, pendistribusian, dan pencarian. Kegiatan administrasi di Indonesia, terutama di tingkat desa, masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam manajemen dokumen dan naskah dinas. Pengarsipan, penyimpanan, dan pencarian dokumen sering tertunda karena sistem yang masih manual dan berbasis kertas. Selain itu, tingkat kerusakan dan kemungkinan kehilangan dokumen sangat tinggi. Sehingga dapat mengganggu kelancaran pelayanan publik serta mengurangi tingkat transparansi dalam administrasi.

Saat ini, pemerintah gencar melakukan upaya untuk mempermudah akses serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan administrasi publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*) [3]. Upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel [4].

*Tabel 1 Perkembangan Indeks SPBE Nasional Tahun 2023-2024*

No.	Tahun	Indeks SPBE Nasional	Kategori
1.	2023	2,79	Baik
2.	2024	3,12	Baik

Sumber: Kementerian PANRB (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks SPBE Nasional mengalami peningkatan dari 2,79 pada tahun 2023 menjadi 3,12 pada tahun 2024. Meskipun kedua capaian tersebut berada dalam kategori “Baik”, peningkatan sebesar 0,33 poin menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan dalam tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, semakin mampu mengintegrasikan layanan digital, memperkuat tata kelola berbasis elektronik, serta meningkatkan kualitas manajemen risiko dan keamanan informasi.

Nilai 3,12 pada tahun 2024 juga mencerminkan bahwa implementasi SPBE secara nasional tidak lagi sekadar pada tahap pengembangan sistem, tetapi mulai mengarah pada optimalisasi dan integrasi layanan yang lebih menyeluruh. Hal ini berarti proses administrasi pemerintahan semakin terdigitalisasi, kolaborasi antarinstansi semakin terkoordinasi, serta pelayanan publik berbasis elektronik menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan tren peningkatan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendorong transformasi digital guna mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

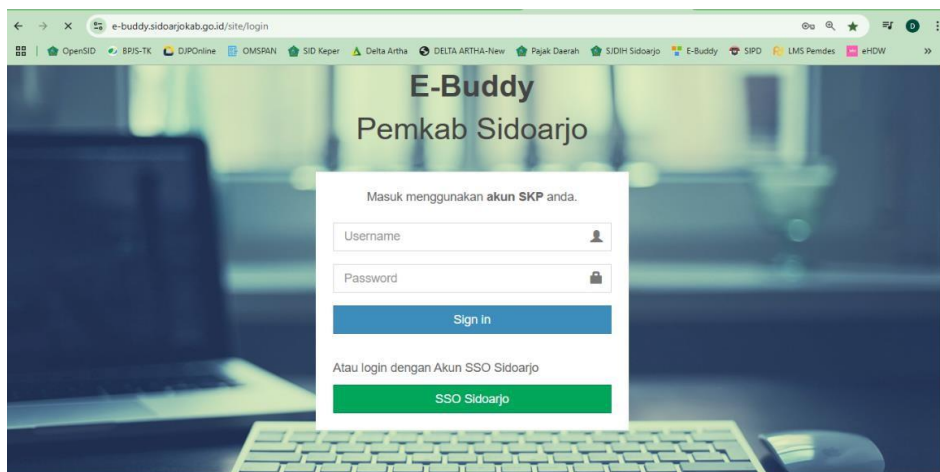
*E-Government* atau pemerintahan berbasis elektronik merupakan terobosan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam layanan publik [5]. Secara sederhana, *E-Government* dapat dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk mentransformasi interaksi dengan masyarakat, sektor swasta, maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya [6]. Di Indonesia, penerapan *E-Government* dilakukan secara bertahap melalui beragam program yang ditujukan untuk mendigitalisasi pelayanan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah [7]. Tujuan dari penerapan *E-Government* ini adalah membangun sistem informasi dan basis data yang selaras dengan birokrasi, sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan dan informasi publik.

Salah satu implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penerapan Naskah Dinas Elektronik. Pelaksanaan naskah ini mengikuti Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011. Naskah dinas elektronik merupakan dokumen resmi yang berisi informasi penting dan disampaikan dalam format digital melalui media elektronik [8]. Dengan kata lain, Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan dokumen kedinasan yang dilakukan melalui sistem berbasis teknologi dan dapat diakses menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet [9].

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan konsep E-Government sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City, yang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat efisiensi proses birokrasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur, serta mendorong transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai implementasi dari regulasi tersebut, pemerintah daerah menghadirkan aplikasi elektronik bernama E-Buddy. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses penerimaan, pencatatan, pengelolaan, hingga pendistribusian surat masuk secara terintegrasi dalam satu sistem. Melalui mekanisme digital, alur administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat terdokumentasi secara sistematis dan lebih terpantau. Dengan demikian, potensi keterlambatan, kehilangan arsip, maupun kesalahan pencatatan dapat diminimalkan.

Kehadiran E-Buddy juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena setiap proses administrasi terekam dalam sistem dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Hal ini selaras dengan prinsip E-Government yang menekankan keterbukaan informasi, efisiensi tata kelola, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Inovasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan sistem pemerintahan digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat [10].



*Gambar 1 Halaman Aplikasi E-Buddy Sidoarjo*

Sumber: *Website* e-buddy.sidoarjokab.go.id

Salah satu penerapan aplikasi E-Buddy di Kabupaten Sidoarjo dapat dicontohkan melalui Pemerintah Desa Keper, Kecamatan Krembung. Di desa ini, E-Buddy digunakan untuk mengelola seluruh proses surat-menyurat dinas, baik surat masuk maupun surat keluar, termasuk tahap disposisi. Pengoperasian aplikasi dilakukan oleh seorang operator yang bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran sistem. Apabila terdapat surat masuk dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang ditujukan ke Pemerintah Desa Keper, dokumen tersebut otomatis diterima melalui akun E-Buddy desa, dan pengelolaannya berada di bawah koordinasi Ketua Seksi Pelayanan. Selanjutnya, surat masuk didisposisikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk tindak lanjut. Meskipun aplikasi ini mendukung pengarsipan otomatis, Pemerintah Desa Keper tetap melakukan pencatatan manual dalam buku besar sebagai cadangan fisik dokumen. Untuk surat keluar, dokumen wajib disusun dalam format .docx sebelum diunggah ke sistem E-Buddy, dilengkapi dengan nomor surat dan barcode tanda tangan elektronik. Mekanisme ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi surat-menyurat, tetapi juga memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola administrasi desa, sejalan dengan prinsip-prinsip E-Government yang bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran sistem. Apabila terdapat surat masuk dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang ditujukan ke Pemerintah Desa Keper, dokumen tersebut otomatis diterima melalui akun E-Buddy desa, dan pengelolaannya berada di bawah koordinasi Ketua Seksi Pelayanan. Selanjutnya, surat masuk didisposisikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk tindak lanjut. Meskipun aplikasi ini mendukung pengarsipan otomatis, Pemerintah Desa Keper tetap melakukan pencatatan manual dalam buku besar sebagai cadangan fisik dokumen. Untuk surat keluar, dokumen wajib disusun dalam format .docx sebelum diunggah ke sistem E-Buddy, dilengkapi dengan nomor surat dan barcode tanda tangan elektronik. Mekanisme ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi surat-menyurat, tetapi juga memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola administrasi desa, sejalan dengan prinsip-prinsip E-Government.

Berdasarkan observasi di lapangan, ditemukan masalah bahwa meskipun penerapan aplikasi E-Buddy di Desa Keper telah membantu proses administrasi surat-menyurat menjadi lebih cepat dan efisien, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi sistem. Beberapa perangkat desa masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur aplikasi karena keterbatasan kemampuan teknologi, sehingga beberapa surat masuk masih dicatat secara manual. Selain itu, jaringan internet yang tidak stabil sering kali menghambat proses unggah dan disposisi surat elektronik. Arsip digital yang seharusnya tersimpan otomatis terkadang tidak tersinkronisasi dengan baik, menyebabkan duplikasi data. Kurangnya pelatihan berkala dan belum adanya petunjuk teknis khusus di tingkat desa juga membuat pemanfaatan E-Buddy belum maksimal. Kondisi ini menimbulkan ketidakefisienan dalam distribusi informasi, keterlambatan tindak lanjut surat, dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan administrasi publik di tingkat desa.

Dalam menganalisis implementasi aplikasi E-Buddy di Desa Keper, penelitian ini menggunakan teori E-Government yang dikemukakan oleh Indrajit yang menekankan enam indikator utama, yaitu infrastruktur data, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, infrastruktur teknologi, serta infrastruktur strategi pemikiran dan kepemimpinan. Infrastruktur data berkaitan dengan ketersediaan dan pengelolaan basis data yang terintegrasi dalam sistem; infrastruktur legal menekankan dukungan regulasi yang menjadi landasan penerapan sistem elektronik; infrastruktur institusional mengacu pada struktur organisasi dan mekanisme kerja yang mendukung implementasi; infrastruktur manusia menilai kompetensi serta kesiapan sumber daya aparatur; infrastruktur teknologi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan pendukung; sedangkan infrastruktur strategi pemikiran dan kepemimpinan berkaitan dengan visi, komitmen, dan arah kebijakan pimpinan dalam mendorong transformasi digital. Keenam indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai

tingkat kesiapan dan efektivitas penerapan E-Government dalam pengelolaan surat menyurat di Desa Keper.

Penelitian sebelumnya yang berjudul "Implementation of E-Government Through E-Buddy in Sidoarjo Regency" meneliti pemanfaatan aplikasi E-Buddy sebagai sistem pengelolaan surat dinas elektronik di Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Hasil studi menunjukkan bahwa dari aspek landasan hukum, penerapan E-Buddy telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik. Selain itu, implementasi ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur tata naskah dinas berbasis elektronik di lingkungan instansi pemerintah [11]. Meski demikian, dari aspek infrastruktur sumber daya manusia, pemanfaatan aplikasi oleh perangkat desa belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari belum adanya surat keluar yang diproses melalui E-Buddy serta disposisi surat yang masih dilakukan lewat chat pribadi maupun komunikasi tatap muka. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam beradaptasi dengan sistem baru. Sementara itu, dari sisi infrastruktur teknologi, penelitian menunjukkan bahwa fasilitas seperti komputer, printer, dan akses Wi-Fi sudah cukup tersedia untuk mendukung distribusi surat dinas serta pengelolaan tata naskah elektronik. Temuan ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar penerapan teknologi E-Government dapat berlangsung lebih optimal.

Penelitian berikutnya berjudul "Analisis Aplikasi E-Buddy Pada Pengelolaan Arsip Surat Masuk (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo)" bertujuan untuk menelaah penerapan E-Buddy dalam pengelolaan arsip surat masuk dengan mengacu pada teori daur hidup arsip elektronik dari Read dan Ginn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penciptaan dan penyimpanan arsip melalui E-Buddy berjalan relatif lancar, namun penginputan data yang sering dilakukan oleh siswa magang berdampak pada akurasi dan efisiensi dokumen [12]. Proses pemeliharaan arsip belum optimal karena belum ada jadwal retensi arsip yang sistematis, sementara aplikasi E-Buddy sering mengalami *down* selama jam kerja akibat *maintenance* atau tingginya jumlah akses. Selain itu, proses disposisi arsip belum berjalan karena belum adanya aturan terkait metode pemusnahan dokumen elektronik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya ketelitian dalam membaca surat masuk, penyusunan jadwal retensi arsip, pembuatan pedoman metode pemusnahan dokumen elektronik, alokasi pekerjaan pengelolaan surat masuk kepada pegawai tetap, pelaksanaan *maintenance* di luar jam kerja, dan peningkatan kapasitas server E-Buddy untuk mengurangi gangguan pada sistem.

Penelitian selanjutnya yang berjudul "Implementasi Penataan Naskah Dinas Elektronik Melalui E-Buddy di Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo" yang dilakukan oleh Ayum Hanifah dan Isnaini Rodiyah menganalisis pelaksanaan penataan naskah dinas elektronik melalui aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Pangreh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Buddy telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan penggunaan WhatsApp dalam penyampaian surat dinas, keterbatasan kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan aplikasi, serta kendala pada fasilitas perangkat. Meskipun pelaksanaan telah mengacu pada regulasi yang berlaku, konsistensi penggunaan sistem dan evaluasi kebijakan masih perlu diperkuat. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparat dan konsistensi pemanfaatan aplikasi menjadi faktor penting dalam mendukung administrasi pemerintahan desa berbasis elektronik [13].

Selanjutnya penelitian yang berjudul "Implementasi Aplikasi E-Buddy dalam Pengelolaan Surat Dinas di Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)" yang dilakukan oleh Riris Dwi Rahmawati dan Ilmi Usrotin Choiriyah menganalisis pelaksanaan pengelolaan surat dinas menggunakan aplikasi E-Buddy di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan E-Buddy di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo telah berjalan cukup baik, terutama dalam mendukung proses administrasi surat secara elektronik. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan kemampuan aparat, gangguan teknis aplikasi, serta belum adanya SOP khusus di tingkat desa. Penelitian ini juga memberikan saran agar dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan SOP internal, serta pengembangan sistem aplikasi agar pengelolaan surat dinas dapat berjalan lebih tertata. Penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan sumber daya dan pembaruan sistem dalam mendukung administrasi pemerintahan berbasis teknologi [14].

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan keempat penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, lokasi, dan aspek yang diteliti. Penelitian ini berjudul "Implementasi E-Government Penggunaan Website E-Buddy dalam Pengelolaan Surat Masuk di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo" berfokus pada implementasi E-Buddy di tingkat desa dengan mengkaji pengelolaan surat masuk secara spesifik melalui pendekatan infrastruktur pendukung. Sementara itu, penelitian [11] menyoroti implementasi E-Buddy di Desa Glagaharum dengan fokus pada aspek landasan hukum, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. Penelitian [12] menganalisis penerapan E-Buddy dalam pengelolaan arsip surat masuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menitikberatkan pada daur hidup arsip elektronik. Penelitian [13] mengkaji implementasi penataan naskah dinas elektronik di Desa Pangreh dengan menyoroti konsistensi penggunaan sistem dan kendala aparat. Adapun penelitian [14] menganalisis pengelolaan surat dinas di Desa Tambak Kalisogo dengan melihat pelaksanaan sistem administrasi berbasis elektronik di tingkat desa.

Dari pembahasan di atas, maka penulis tertarik memilih Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat penelitian dikarenakan desa ini telah menerapkan aplikasi E-Buddy sebagai bagian dari implementasi E-Government dalam pengelolaan surat masuk secara elektronik, namun proses pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman perangkat

desa terhadap penggunaan sistem digital, sehingga beberapa proses administrasi masih dilakukan secara manual sebagai cadangan. Selain itu, penelitian di Desa Keper menjadi menarik karena wilayah ini merupakan salah satu desa yang aktif mendukung program digitalisasi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola surat menyurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E-Government melalui penggunaan aplikasi E-Buddy dalam pengelolaan surat masuk di Desa Keper serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi aplikasi E-Buddy dalam pengelolaan administrasi surat-menyurat di tingkat desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi konsep E-Government melalui aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) di lingkungan pemerintahan desa dengan menggunakan kerangka teori Indrajit yang mencakup enam indikator utama, yaitu infrastruktur data, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, infrastruktur teknologi, serta infrastruktur pemikiran dan kepemimpinan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder [15]. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai penerapan aplikasi E-Buddy. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan peran dan keterlibatan langsung dalam operasional aplikasi, yaitu Sekretaris Desa serta Kaur TU dan Umum sebagai informan utama. Dalam pengolahan dan analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, informasi dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan reduksi data dengan menyaring dan memfokuskan informasi agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai implementasi aplikasi E-Buddy di Desa Keper [16].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Infrastruktur Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur TU dan Umum Desa Keper, dijelaskan bahwa aplikasi E-Buddy di desa ini mengelola beberapa jenis data administrasi penting. "*Jenis data yang kami kelola mencakup surat masuk, surat keluar, dan disposisi. Semua dokumen ini harus terdokumentasi dengan baik agar tidak ada yang terlewat,*" ungkapannya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurutnya, ketiga jenis data tersebut merupakan inti dari proses administrasi desa yang sehari-hari digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem ini, alur dokumentasi menjadi lebih tertib dibandingkan sistem manual sebelumnya, sehingga perangkat desa lebih mudah mengelola surat menyurat dengan baik.

Masih menurut Kaur TU dan Umum, alur data surat masuk hingga selesai diproses di E-Buddy berjalan dengan sistematis. "*Setiap surat masuk pertama kali diterima oleh operator E-Buddy, kemudian didisposisikan ke sekretaris desa. Setelah itu baru disampaikan kepada kepala desa untuk diberikan tindak lanjut,*" jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Dengan adanya mekanisme alur tersebut, setiap surat dapat dipastikan mengikuti prosedur sesuai dengan struktur hierarki yang berlaku sehingga jelas pihak yang memegang tanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa sistem ini berperan dalam menjaga keteraturan sekaligus memastikan tidak ada surat penting yang terlewatkan. Selain itu, keberadaan sistem ini mempermudah perangkat desa dalam melakukan pemantauan karena seluruh proses disposisi terekam dengan baik.

Ketika ditanya mengenai penyimpanan data, Kaur TU dan Umum menekankan pentingnya sistem penyimpanan yang rapi agar tidak terjadi kesalahan administrasi. "*Data yang masuk ke E-Buddy tersimpan dengan rapi, dan kami juga menyiapkan sistem backup manual dalam folder komputer. Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi gangguan, arsip tetap aman,*" jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurutnya, langkah ini memang masih sederhana, namun cukup efektif untuk menjaga keamanan informasi di tingkat desa. Dengan adanya kerapian dalam penyimpanan, seluruh surat masuk maupun keluar tetap dapat diakses kembali dengan cepat apabila diperlukan. Hal ini memperlihatkan bahwa meski berbasis teknologi, aspek pengarsipan manual tetap dipertahankan untuk menjamin ketahanan data.

Lebih lanjut, Kaur TU dan Umum juga menyampaikan bahwa desa telah memiliki sistem cadangan untuk mengantisipasi kehilangan data. "*Selain tersimpan di aplikasi E-Buddy, kami juga membuat backup manual agar data tetap aman. Hal ini sangat penting karena komputer desa tidak bisa lepas dari risiko kerusakan atau gangguan teknis,*" ujarnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurutnya, cadangan data merupakan langkah antisipatif agar

pelayanan administrasi desa tetap berjalan meskipun terjadi kendala pada perangkat. Dengan adanya backup, kinerja pelayanan publik tidak terganggu sehingga masyarakat tetap mendapatkan haknya dengan cepat. Hal ini menunjukkan kesadaran perangkat desa dalam mengantisipasi kemungkinan risiko yang bisa terjadi kapan saja.

Kaur TU dan Umum juga menegaskan bahwa E-Buddy membawa dampak positif terhadap pelayanan administrasi desa. *“Dengan adanya E-Buddy, pelayanan surat menyurat jadi lebih cepat, tertib, dan transparan. Masyarakat bisa merasakan bahwa pelayanan publik semakin efisien,”* tuturnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Ia menambahkan bahwa aplikasi ini sekaligus meningkatkan kualitas birokrasi di tingkat desa dengan menciptakan sistem yang lebih modern. Meskipun masih ada keterbatasan pada sumber daya manusia, manfaatnya dirasakan secara nyata baik oleh perangkat desa maupun masyarakat. Proses administrasi kini dapat dilakukan lebih terukur karena data tercatat secara otomatis. Dengan demikian, E-Buddy menjadi salah satu inovasi digital yang mendukung reformasi birokrasi di tingkat desa.

Tabel 2 Pengelolaan Surat Pada Akun E-Buddy Desa Keper

No.	Tahun	Surat Masuk	Surat Keluar	Disposisi
1.	2021	87	-	87
2.	2022	265	-	265
3.	2023	268	53	268
4.	2024	284	73	284

Sumber: Pemerintah Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo (2024)

Berdasarkan data pada tabel tersebut, pengelolaan surat melalui akun E-Buddy Desa Keper menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah surat yang dikelola mencerminkan semakin optimalnya pemanfaatan sistem digital dalam proses administrasi desa. Pada tahap awal implementasi, penggunaan aplikasi cenderung masih terbatas karena adanya proses adaptasi aparatur desa terhadap sistem baru. Seiring berjalannya waktu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kebiasaan kerja yang mulai terdigitalisasi, serta kebutuhan pelayanan administrasi yang semakin kompleks mendorong intensitas penggunaan E-Buddy menjadi lebih tinggi.

Mulainya pencatatan surat keluar pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa sistem tidak lagi hanya dimanfaatkan untuk pengarsipan surat masuk, tetapi telah berkembang menjadi instrumen administrasi yang lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya perluasan fungsi aplikasi dalam mendukung tata kelola surat menyurat secara dua arah, sekaligus memperkuat tertib administrasi di tingkat desa.

Konsistensi peningkatan pada aspek disposisi memperlihatkan bahwa proses tindak lanjut surat berjalan seiring dengan peningkatan volume surat yang diterima. Kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas dan ketepatan alur birokrasi, di mana setiap surat yang masuk terdokumentasi dan diproses melalui mekanisme yang lebih sistematis. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan adanya perbaikan dalam manajemen administrasi berbasis digital, yang tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan layanan, tetapi juga oleh komitmen pemerintah desa dalam mengoptimalkan sistem informasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja.

## B. Infrastruktur Legal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur TU dan Umum Desa Keper, dijelaskan bahwa penggunaan aplikasi E-Buddy di desa ini memiliki dasar hukum yang jelas. *“Dasar hukum penggunaan aplikasi E-Buddy merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya terkait dengan digitalisasi pelayanan administrasi desa. Aturan ini menjadi pedoman bagi seluruh desa untuk melaksanakan tata kelola surat menyurat secara elektronik,”* ujarnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurut beliau, keberadaan dasar hukum ini penting agar desa tidak menjalankan sistem digital tanpa acuan yang sah. Dengan adanya regulasi kabupaten, perangkat desa merasa lebih aman dalam mengoperasikan aplikasi tersebut karena sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masih menurut Kaur TU dan Umum, dasar hukum ini juga berfungsi sebagai legitimasi formal agar penggunaan E-Buddy dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. *“Kami di desa tidak bisa sembarangan menggunakan aplikasi, sehingga perlu ada aturan yang menaungi. Regulasi dari kabupaten menjadi payung hukum yang melindungi kami, baik dalam aspek prosedur maupun pertanggungjawaban data,”* jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa memahami bahwa dasar hukum tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi perlindungan hukum apabila terjadi persoalan administratif. Dengan kata lain, desa merasa memiliki dasar yang kuat untuk mengimplementasikan E-Buddy sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik.

Terkait aturan atau SOP, Kaur TU dan Umum menyampaikan bahwa Desa Keper masih mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kabupaten. *“Kalau untuk SOP internal desa, memang belum ada. Kami hanya mengacu pada aturan dan petunjuk teknis dari pemerintah kabupaten,”* ungkapnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurut beliau, kondisi ini wajar karena kebijakan terkait E-Buddy masih terpusat di tingkat kabupaten sehingga desa tidak membuat aturan sendiri. Hal ini membuat seluruh desa memiliki standar yang sama dalam pengelolaan administrasi digital, sehingga tidak menimbulkan perbedaan antar wilayah. Dengan demikian, perangkat desa menjalankan aplikasi sesuai arahan yang telah ditetapkan dari atas.

Kaur TU dan Umum menambahkan bahwa meskipun belum ada SOP internal, perangkat desa tetap berupaya

menjalankan tugas dengan disiplin. “Kami berusaha menyesuaikan praktik sehari-hari dengan aturan kabupaten. Meskipun tidak tertulis dalam aturan internal desa, kami tetap membuat kesepakatan bersama antarperangkat agar alur pekerjaan sesuai ketentuan,” jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Kesepakatan informal ini menjadi semacam aturan tidak tertulis yang membantu perangkat desa dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini juga memperlihatkan adanya inisiatif dari perangkat desa untuk menjaga keteraturan meski belum ada SOP yang benar-benar resmi di tingkat desa.

Saat ditanya mengenai pemahaman perangkat desa terhadap aturan hukum yang melandasi penggunaan aplikasi ini, Kaur TU dan Umum menuturkan bahwa pemahaman diperoleh melalui sosialisasi dari pihak kabupaten. “Biasanya ada pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah kabupaten untuk menjelaskan aturan hukum sekaligus cara penggunaan aplikasi. Dari kegiatan itu, perangkat desa mendapat pemahaman tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting karena perangkat desa bukan hanya dituntut menguasai teknis aplikasi, tetapi juga harus memahami aspek regulasi yang mendasarinya. Dengan cara itu, perangkat desa bisa bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Kaur TU dan Umum juga menegaskan bahwa pemahaman hukum ini terus diperkuat dengan praktik sehari-hari. “Setiap kali kami menggunakan aplikasi, kami mengingat kembali arahan dari kabupaten. Kalau ada hal yang belum jelas, kami langsung berkoordinasi dengan pihak kecamatan atau kabupaten untuk memastikan tidak melanggar aturan,” ungkapnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurut beliau, sikap kehati-hatian ini penting karena kesalahan dalam administrasi dapat berdampak pada keabsahan dokumen desa. Dengan demikian, perangkat desa terus berupaya meningkatkan pemahaman mereka agar aplikasi berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Tabel 3 Regulasi dan Dasar Hukum Penggunaan Aplikasi E-Buddy

Regulasi	Isi Pokok	Lingkup	Keterangan di Desa Keper
“Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003”	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government	Nasional	Jadi dasar awal pengembangan e-Gov di seluruh instansi pemerintah
“Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018”	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Nasional	Menjadi kerangka umum penerapan SPBE, termasuk di daerah
“PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2011”	Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik	Nasional	Mengatur tata kelola naskah dinas elektronik pada instansi pemerintah
“Peraturan Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2018”	Tata Kelola TIK Menuju Smart City	Kabupaten	Menjadi payung hukum penerapan aplikasi berbasis digital di Sidoarjo
“Peraturan Bupati Sidoarjo No. 30 Tahun 2020”	Tata Naskah Dinas Elektronik	Kabupaten	Menjadi dasar hukum penggunaan aplikasi E-Buddy di lingkungan Pemkab & Desa
“SOP Internal Desa”	-	Desa	Tidak tersedia, desa hanya mengikuti arahan Kabupaten

Sumber: Pemerintah Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo (2024)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi E-Buddy di Desa Keper memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas, baik pada tingkat nasional maupun kabupaten. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjadi dasar pengembangan e-Government serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mendorong seluruh lembaga pemerintahan, termasuk desa, untuk mengadopsi digitalisasi layanan. Selain itu, PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2011 memberikan pedoman tata naskah dinas elektronik yang mendukung administrasi berbasis digital. Di tingkat kabupaten, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 dan Nomor 30 Tahun 2020 menjadi acuan langsung bagi desa dalam pengoperasian E-Buddy. Hal ini sejalan dengan keterangan Kaur TU dan Umum bahwa meskipun Desa Keper belum memiliki SOP khusus, pelaksanaan tetap merujuk pada regulasi kabupaten. Dengan demikian, penerapan E-Buddy terjamin keabsahan, keseragaman, serta perlindungan administratifnya.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur hukum dalam penerapan E-Buddy di Desa Keper telah didukung oleh dasar hukum yang kuat, meskipun sebagian besar mengacu pada regulasi tingkat kabupaten. Ketiadaan SOP internal di desa membuat perangkat desa mengacu pada peraturan kabupaten, yang tetap efektif karena menciptakan keseragaman standar antar desa. Pemahaman perangkat desa terhadap regulasi diperoleh melalui sosialisasi, pelatihan teknis, serta pengalaman praktik sehari-hari. Dengan demikian, aspek legal menjadi fondasi penting yang mendukung keberhasilan implementasi E-Buddy di tingkat desa. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi juga menjamin keabsahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi desa. Infrastruktur hukum yang kokoh ini menjadi syarat utama agar digitalisasi layanan pemerintahan berjalan lancar dan berkelanjutan.

### C. Infrastruktur Institusional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur TU dan Umum Desa Keper, dijelaskan bahwa seluruh perangkat desa memiliki keterlibatan dalam penggunaan aplikasi E-Buddy. *“Pada dasarnya semua perangkat desa dapat terlibat dalam proses administrasi melalui E-Buddy, terutama ketika ada surat yang harus diproses. Namun, akses penuh terhadap surat masuk, surat keluar, dan disposisi hanya diberikan kepada operator, sehingga tidak semua perangkat bisa membuka dokumen-dokumen tersebut,”* jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun E-Buddy terbuka untuk menunjang kerja bersama, tetap ada batasan akses yang ketat agar data administrasi tetap terjaga. Dengan cara ini, transparansi tetap ada tetapi kerahasiaan dan keamanan dokumen juga bisa dikontrol dengan baik.

Lebih lanjut, Kaur TU dan Umum menegaskan bahwa peran operator sangat sentral dalam menjaga alur kerja administrasi desa. *“Operatorlah yang memastikan surat masuk segera diinput, kemudian disampaikan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Jadi meskipun semua perangkat bisa mengetahui adanya surat, akses penuh tetap berada di tangan operator agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan data,”* ujarnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem kerja E-Buddy dirancang agar lebih tertib, dengan penanggung jawab khusus yang mengelola akses utama. Dengan demikian, keterlibatan perangkat tetap berjalan, tetapi dalam koridor tanggung jawab yang sudah diatur.

Terkait dengan alur koordinasi antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur TU dan Umum, narasumber menjelaskan bahwa alurnya berjalan dengan jelas. *“Setiap surat masuk pertama kali diinput oleh operator, kemudian didisposisikan ke sekretaris desa untuk diverifikasi. Setelah itu, surat diteruskan ke kepala desa untuk diputuskan tindak lanjutnya,”* jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Proses ini menurut beliau sangat penting agar setiap surat mendapat perhatian yang sesuai dengan tingkat urgensinya. Dengan adanya sistem disposisi yang berjenjang, keputusan yang diambil kepala desa bisa lebih tepat sasaran karena sudah melalui verifikasi sekretaris desa.

Selain itu, koordinasi ini juga melibatkan komunikasi intensif antarperangkat untuk memastikan tidak ada surat yang terlewat. *“Kami selalu melakukan komunikasi langsung dengan kepala desa maupun sekretaris desa, baik melalui aplikasi maupun tatap muka, agar surat yang masuk segera mendapatkan tindak lanjut. Koordinasi ini penting karena tidak semua surat bisa diputuskan cepat tanpa pertimbangan, jadi jalurnya memang harus berjenjang,”* tambahnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Pola alur tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi E-Buddy tidak semata ditopang oleh teknologi, melainkan juga oleh keteraturan koordinasi antarperangkat desa. Dengan cara ini, mekanisme kerja tetap terjaga secara seimbang antara proses digital dan komunikasi manual.

Mengenai pembagian tugas resmi untuk operator aplikasi, Kaur TU dan Umum menjelaskan bahwa sudah ada kejelasan peran. *“Operator secara resmi ditunjuk oleh kepala desa dan sekretaris desa, sehingga kewenangan penggunaan aplikasi ada di bawah kendali mereka. Dengan begitu, kami yang bertugas sebagai operator tahu betul batasan tugas yang harus dilakukan,”* ungkapnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Hal ini membuat peran operator menjadi lebih jelas, yaitu mengelola surat masuk, surat keluar, dan disposisi sesuai dengan arahan dari pimpinan desa. Dengan pembagian tugas yang jelas, tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan lebih terarah.

Ia juga menambahkan bahwa pembagian kewenangan ini membantu menciptakan sistem administrasi yang lebih tertib. *“Kalau semua orang bisa mengakses, justru berisiko menimbulkan kesalahan input atau duplikasi. Karena itu, hanya operator yang ditugasi, sementara kepala desa dan sekretaris desa memiliki otoritas untuk memberi arahan atau keputusan disposisi,”* ujarnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Dengan mekanisme ini, alur administrasi tetap efisien namun tetap dalam kendali yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi E-Buddy tidak hanya menjadi alat teknologi, tetapi juga mendukung pola kerja yang lebih disiplin.

Tabel 4 Struktur Organisasi Desa Keper

No.	Nama	Jabatan	Keterangan Tugas Utama
1.	Suharto	“Kepala Desa”	Pimpinan desa, pengambilan keputusan disposisi
2.	Ardi Perdana Sukma	“Sekretaris Desa”	Koordinasi administrasi, verifikasi surat
3.	Nikmatul Maula	Kaur TU dan Umum	Operator E-Buddy: input surat masuk/keluar, disposisi
4.	Suci Isnaini	Kasi Pelayanan	Administrasi umum dan tata usaha
5.	Amirul Vardiansyah	Staf Pelayanan Desa	Membantu kasi pelayanan dalam input data dan administrasi surat
6.	Imam Sugiantoro	Kasi Kesejahteraan	Bidang kesejahteraan sosial
7.	Zaenal Arifin	Kaur Keuangan	Pengelolaan keuangan desa
8.	Sutrisno	Kaur Perencanaan	Perencanaan pembangunan desa
9.	Sukandar	Kepala Dusun	Koordinasi wilayah Dusun Keper
10.	Suyadi	Kepala Dusun	Koordinasi wilayah Dusun Bogem

Sumber: Pemerintah Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo (2024)

Struktur organisasi Desa Keber menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab yang teratur dalam pengelolaan administrasi, termasuk pemanfaatan aplikasi E-Buddy. Kepala desa berfungsi sebagai pihak yang menentukan arah disposisi, sementara sekretaris desa berperan dalam koordinasi administrasi serta verifikasi surat. Adapun Kaur TU dan Umum bertindak sebagai operator utama aplikasi. Perangkat lain, seperti seksi pelayanan dan staf pelayanan, membantu urusan tata usaha dan input data, sedangkan bagian keuangan, perencanaan, serta kepala dusun fokus pada bidang kerjanya masing-masing. Susunan ini menegaskan adanya keseimbangan antara sistem kerja manual dan dukungan digital. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Kaur TU dan Umum mengenai pola koordinasi dan penggunaan akses aplikasi E-Buddy.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur kelembagaan dalam implementasi aplikasi E-Buddy di Desa Keber berjalan secara efektif karena melibatkan seluruh perangkat desa, meskipun akses utama dikelola oleh operator. Koordinasi antara kepala desa, sekretaris desa, serta Kaur TU dan Umum dilakukan secara berlapis sehingga alur pengelolaan surat tetap tertib dan terstruktur. Pembagian tugas yang jelas menempatkan operator sebagai pengendali utama aplikasi, sementara pimpinan desa memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan strategis. Struktur organisasi yang terorganisir ini memperkuat tata kelola administrasi desa, karena setiap perangkat memiliki peran yang saling melengkapi. Dengan demikian, E-Buddy tidak hanya menjadi sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga memperkuat sistem kelembagaan desa secara menyeluruh. Efektivitas koordinasi dan pembagian wewenang ini menjadi faktor kunci keberhasilan operasional aplikasi di tingkat desa.

#### **D. Infrastruktur Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur TU dan Umum Desa Keber, dijelaskan bahwa perangkat desa sudah pernah mendapatkan pelatihan mengenai aplikasi E-Buddy sejak awal peluncurannya. *“Kami pertama kali mendapatkan bimbingan teknis pada tahun 2020, tepat saat aplikasi ini mulai diimplementasikan. Pelatihan tersebut diberikan langsung oleh pihak kabupaten agar perangkat desa bisa memahami alur penggunaan sistem, mulai dari input surat masuk hingga disposisi,”* jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurut beliau, pelatihan awal ini menjadi pondasi penting agar perangkat desa tidak kebingungan ketika aplikasi resmi digunakan dalam kegiatan administrasi harian. Dengan adanya pelatihan tersebut, perangkat desa memiliki pemahaman dasar yang cukup kuat dalam menjalankan aplikasi.

Ia menambahkan bahwa setelah pelatihan awal, perangkat desa kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi lanjutan pada tahun 2021. *“Pada tahun berikutnya, kami juga ikut serta dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan untuk memperdalam pemahaman, terutama terkait pembaruan sistem. Hal ini sangat membantu karena beberapa fitur aplikasi mengalami pengembangan sehingga perlu dipahami lagi oleh perangkat desa,”* ujarnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Dengan adanya dua kali pelatihan tersebut, perangkat desa merasa lebih siap dalam memanfaatkan E-Buddy untuk mendukung pelayanan administrasi. Menurutnya, tanpa pelatihan lanjutan, perangkat mungkin akan mengalami kesulitan karena sistem terus berkembang dari tahun ke tahun.

Mengenai kendala penggunaan aplikasi E-Buddy, Kaur TU dan Umum menegaskan bahwa secara teknis perangkat desa tidak menghadapi kesulitan berarti. *“Kalau dari sisi kemampuan perangkat, alhamdulillah tidak ada masalah yang besar. Semua perangkat sudah terbiasa dengan aplikasi ini. Kendala utama sebenarnya hanya pada jaringan internet yang kadang tidak stabil,”* jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Kondisi jaringan yang tidak merata di beberapa titik desa membuat proses input data terkadang sedikit terhambat. Namun, hal ini masih bisa diatasi dengan cara menunggu hingga jaringan kembali normal.

Ia juga menjelaskan bahwa kendala jaringan tersebut tidak sampai mengurangi manfaat aplikasi secara keseluruhan. *“Walaupun ada gangguan jaringan, aplikasi tetap sangat membantu pekerjaan kami. Prosesnya jadi lebih cepat dibandingkan dulu yang masih manual. Jadi kendala ini tidak bisa disebut hambatan besar, hanya faktor teknis yang sesekali muncul,”* tambahnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurut beliau, perangkat desa telah cukup adaptif dalam menghadapi kendala semacam ini karena sudah memahami betul bagaimana sistem bekerja. Dengan demikian, penggunaan aplikasi masih berjalan dengan lancar meskipun ada hambatan kecil.

Menjawab pertanyaan tentang bagaimana respon perangkat desa terhadap aplikasi E-Buddy, Kaur TU dan Umum menyatakan bahwa perangkat merasa sangat terbantu. *“Kami merasa aplikasi ini membuat pekerjaan administrasi lebih mudah, terutama dalam hal pengiriman surat. Kalau dulu butuh waktu lama, sekarang lebih cepat karena sistem sudah terintegrasi,”* uniknya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurut beliau, perubahan ini membuat perangkat desa bisa lebih fokus pada hal penting lainnya, karena pekerjaan administrasi surat sudah lebih tertata. Aplikasi ini juga membantu menjaga arsip agar tidak mudah hilang.

Ia menambahkan bahwa perangkat desa melihat aplikasi ini bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai solusi dalam mendukung pekerjaan administrasi sehari-hari. *“Dengan E-Buddy, kami jadi lebih tertib dalam pencatatan surat masuk dan keluar. Tidak ada lagi surat yang tercecer atau terlambat diproses. Jadi aplikasi ini benar-benar meringankan pekerjaan, bukan menambah beban,”* ujarnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi telah terintegrasi dalam rutinitas kerja perangkat desa dan dipersepsikan memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi.

Tingkat penerimaan yang positif ini terlihat dari perubahan pola kerja yang lebih terstruktur, terutama dalam hal pencatatan, penelusuran arsip, dan pemantauan alur disposisi surat. Manfaat yang dirasakan secara langsung dalam

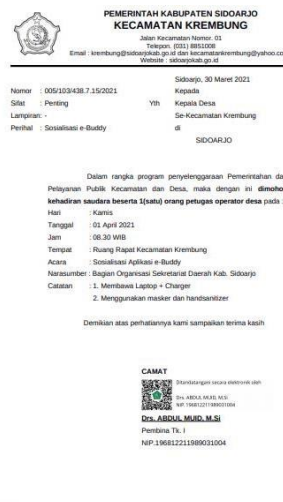
aktivitas harian menjadi faktor penting dalam membangun sikap terbuka terhadap teknologi digital. Dengan demikian, penerimaan perangkat desa terhadap E-Buddy tidak hanya didasarkan pada kebijakan dari atas, tetapi juga karena adanya pengalaman praktis yang menunjukkan kontribusi sistem terhadap kelancaran proses administrasi di desa.



Gambar 2 Dokumentasi Live Streaming Pelatihan E-Buddy

Sumber: Youtube Kabupaten Sidoarjo

Data pertama berupa dokumentasi live streaming sosialisasi pada tahun 2020 dengan judul “*Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi E-Buddy bagi Perangkat Daerah dan UPTD Dinas/Badan/Kecamatan/Bagian di Lingkungan Pemkab Sidoarjo*” mendukung pernyataan narasumber bahwa perangkat desa memang mendapatkan pelatihan awal sebelum menggunakan aplikasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2020 ini menjadi bukti nyata bahwa kesiapan perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi sudah dipersiapkan sejak dini. Melalui bimbingan teknis tersebut, perangkat desa tidak hanya memahami teori, tetapi juga praktik penggunaan E-Buddy. Hal ini sangat relevan dengan penjelasan Kaur TU dan Umum yang menegaskan bahwa pelatihan awal menjadi dasar kuat dalam menjalankan aplikasi.



Gambar 3 Surat Sosialisasi E-Buddy

Sumber: Pemerintah Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo (2024)

Data kedua berupa surat sosialisasi aplikasi E-Buddy pada 1 April 2021 yang dilaksanakan di Kecamatan Krembung semakin memperkuat informasi bahwa perangkat desa mendapatkan pembekalan lanjutan. Kehadiran kepala desa se-Kecamatan Krembung pada kegiatan ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan aplikasi benar-benar dipahami. Narasumber kegiatan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi pihak yang memberi arahan langsung mengenai teknis aplikasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kaur TU dan Umum bahwa pelatihan kedua membantu perangkat desa memahami pembaruan fitur. Dengan demikian, data ini membuktikan bahwa aplikasi E-Buddy memang didukung dengan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten.

Selain aspek pelatihan dan penerimaan perangkat desa terhadap aplikasi, ketersediaan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kelancaran operasional E-Buddy. Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan akun E-Buddy di Desa Keper masih terpusat pada satu orang operator, yaitu Kaur TU dan Umum. Dalam kondisi normal, proses surat

masuk sejak diterima dalam sistem hingga didisposisikan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 hari kerja. Namun, apabila operator tidak hadir atau terdapat kendala teknis, proses tersebut dapat mengalami keterlambatan hingga 2–3 hari kerja. Secara rata-rata, waktu penyelesaian surat dari tahap penerimaan sampai disposisi berada pada kisaran 1–2 hari kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kompetensi perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi sudah memadai, ketergantungan pada satu personel menimbulkan potensi hambatan dalam kesinambungan pelayanan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas atau penunjukan operator cadangan agar proses pengelolaan surat tetap berjalan stabil dan tidak terhambat oleh faktor kehadiran individu tertentu.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur sumber daya manusia dalam penerapan aplikasi E-Buddy di Desa Keper tergolong memadai karena didukung pelatihan awal maupun lanjutan. Kendala yang muncul relatif minor, terutama terkait kualitas jaringan internet, dan tidak mengganggu efektivitas penggunaan aplikasi secara keseluruhan. Respon perangkat desa menunjukkan antusiasme tinggi, di mana mereka merasa terbantu dan lebih efisien dalam melaksanakan administrasi. Data yang ada menegaskan bahwa sosialisasi dan pembinaan yang diberikan pemerintah daerah berdampak nyata terhadap kesiapan perangkat desa. Dengan demikian, keberhasilan implementasi E-Buddy sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi SDM desa. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pembinaan berkelanjutan menjadi faktor kunci agar sistem dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

### E. Infrastruktur Teknologi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur TU dan Umum Desa Keper, dijelaskan bahwa sarana dan prasarana untuk mendukung penggunaan aplikasi E-Buddy sudah cukup memadai. *“Kami memiliki beberapa perangkat yang digunakan sehari-hari, seperti tiga unit komputer merek Asus dan tiga laptop Lenovo. Selain itu, untuk mendukung pencetakan dokumen, kami juga menggunakan empat printer dengan kondisi yang semuanya masih baik. Sarana internet berupa jaringan Wi-Fi Indihome juga sudah tersedia di kantor desa, sehingga memudahkan akses aplikasi,”* jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurut beliau, ketersediaan sarana ini sangat membantu memperlancar operasional administrasi.

Ia menambahkan bahwa dengan sarana yang ada, perangkat desa tidak mengalami kesulitan berarti dalam mengakses maupun mengelola surat melalui aplikasi. *“Semua perangkat berfungsi dengan baik, jadi pekerjaan harian bisa berjalan lancar. Yang penting adalah perawatan secara rutin, baik untuk komputer maupun printer, agar tidak ada gangguan teknis saat digunakan. Kami juga memastikan jaringan internet tetap terhubung sehingga aplikasi bisa diakses kapan saja,”* ungkapnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Dari sisi teknologi, menurutnya, Desa Keper cukup siap dalam menjalankan aplikasi E-Buddy untuk pelayanan administrasi.

Terkait kualitas jaringan internet, Kaur TU dan Umum menjelaskan bahwa secara umum kondisi jaringan cukup stabil, meskipun kadang terjadi gangguan. *“Jaringan Indihome di kantor desa memiliki kecepatan 50 mbps, dan itu sudah cukup untuk mendukung akses aplikasi. Namun memang ada kalanya jaringan melambat atau terputus, terutama saat ada gangguan teknis dari penyedia layanan,”* paparnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Gangguan tersebut tidak terlalu sering terjadi, tetapi bisa sedikit menghambat jika sedang ada pekerjaan mendesak. Beliau menambahkan bahwa kendala jaringan tersebut biasanya bisa segera diatasi dengan menunggu pemulihan dari penyedia layanan. *“Kalau jaringan tiba-tiba melambat, kami biasanya menunggu beberapa waktu atau menggunakan alternatif jaringan pribadi. Jadi meskipun ada kendala, tidak sampai mengganggu secara signifikan. Yang penting pekerjaan tetap bisa diselesaikan meskipun waktunya agak molor,”* lanjutnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Dengan demikian, permasalahan jaringan bukan hambatan besar, hanya faktor teknis yang wajar terjadi di desa.

Menjawab pertanyaan tentang kendala teknis pada aplikasi, Kaur TU dan Umum menjelaskan bahwa pernah ada kejadian server down. *“Kalau server E-Buddy sedang maintenance atau error, biasanya kami dapat pemberitahuan langsung dari pihak kabupaten melalui sistem aplikasi. Jadi kami tahu kapan bisa digunakan lagi,”* jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Gangguan ini biasanya hanya bersifat sementara dan jarang terjadi, tetapi tetap perlu diperhatikan karena bisa memengaruhi kelancaran kerja.

Ia juga menjelaskan bahwa perangkat desa tidak bisa melakukan banyak hal ketika terjadi server down. *“Kalau server bermasalah, kami hanya bisa menunggu sampai sistem kembali normal. Tidak ada alternatif lain, karena semua akses dikendalikan dari kabupaten. Jadi solusinya adalah menunda pekerjaan sampai aplikasi bisa digunakan kembali,”* tambahnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurut beliau, meskipun agak mengganggu, hal ini sudah menjadi prosedur standar yang diterima perangkat desa.

Tabel 5 Data Sarana Prasarana Desa Keper

Jenis Sarana / Prasarana	Jumlah	Kondisi
Komputer (Asus)	3	Baik
Printer (Epson L310, Brother DCP-L25400W, HP Smart Tank 615)	4	Baik
Jaringan Wi-Fi (Indihome)	1 titik (50 mbps)	Cukup Stabil
Laptop (Lenovo 81WH)	3	Baik

Sumber: Pemerintah Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo (2024)

Data pertama berupa tabel sarana prasarana membuktikan bahwa ketersediaan perangkat teknologi di Desa Keper memang cukup lengkap. Tiga unit komputer, tiga laptop, empat printer, dan satu titik Wi-Fi dengan kecepatan 50 mbps sudah cukup untuk menunjang operasional aplikasi. Semua sarana tercatat dalam kondisi baik atau stabil, sehingga mendukung kelancaran kerja perangkat desa. Data ini sangat relevan dengan pernyataan narasumber yang menekankan bahwa sarana teknologi menjadi faktor utama dalam menjaga efektivitas penggunaan E-Buddy. Dengan kondisi yang ada, perangkat desa bisa lebih fokus pada pelayanan tanpa khawatir soal keterbatasan sarana.



Gambar 4 Surat Pemberitahuan Gangguan E-Buddy

Sumber: Pemerintah Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo (2024)

Data kedua berupa surat pemberitahuan gangguan E-Buddy pada Juli 2024 menunjukkan adanya transparansi dari pihak kabupaten dalam menginformasikan kendala teknis. Misalnya, pada 1 Juli 2024 terjadi maintenance yang mengganggu presensi pulang pegawai, dan pada 22 Juli 2024 server overload menyebabkan kendala serupa. Informasi resmi ini memperkuat pernyataan narasumber bahwa perangkat desa memang mendapat pemberitahuan jika terjadi gangguan sistem. Dengan demikian, perangkat desa tidak bekerja dalam ketidakpastian, melainkan menyesuaikan pekerjaan dengan jadwal pemulihan server. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan desa terkait pengelolaan aplikasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa infrastruktur teknologi untuk mendukung aplikasi E-Buddy di Desa Keper sudah memadai, baik dari sisi sarana prasarana maupun dukungan jaringan. Kendala yang muncul umumnya terkait jaringan internet yang kadang melambat atau gangguan server dari kabupaten. Namun perangkat desa sudah terbiasa mengatasi kondisi ini, baik dengan menunggu perbaikan atau menggunakan alternatif jaringan. Ketersediaan data sarpras yang lengkap dan adanya pemberitahuan resmi dari kabupaten menjadi bukti bahwa aplikasi berjalan dalam sistem yang cukup tertata. Oleh karena itu, secara keseluruhan, teknologi yang ada mampu mendukung implementasi E-Buddy secara efektif di Desa Keper.

## F. Strategi Pemikiran dan Kepemimpinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Keper, beliau menegaskan bahwa digitalisasi surat-menyurat melalui aplikasi E-Buddy merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kerja di desa. *“Bagi kami, aplikasi ini membuat pengiriman surat menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan dengan sistem manual. Kalau dulu kita harus bolak-balik membawa surat fisik, sekarang cukup dengan sistem E-Buddy semua bisa sampai dengan cepat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, transparansi administrasi juga lebih terjaga karena semua data tersimpan di sistem,”* ungkapnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurut beliau, keberadaan aplikasi ini adalah wujud nyata modernisasi pelayanan publik di desa.

Kepala Desa juga menambahkan bahwa pemanfaatan E-Buddy mendukung visi desa untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi. *“Dengan adanya E-Buddy, desa tidak lagi tertinggal dalam hal digitalisasi administrasi. Ini penting karena masyarakat sekarang menuntut pelayanan yang cepat dan akurat. Jadi, bagi kami digitalisasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan nyata agar pelayanan publik di desa bisa lebih modern dan profesional,”* jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Beliau menekankan bahwa desa harus terus adaptif terhadap perkembangan teknologi demi memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.

Ketika ditanya mengenai strategi desa dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi, Kepala Desa menjelaskan

bahwa desa tetap menjaga keseimbangan antara sistem digital dan manual. “Kami masih menggunakan arsip manual sebagai backup, karena bagaimanapun sistem digital juga bisa mengalami kendala. Selain itu, kami membuat arsip folder di komputer agar lebih aman jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali. Strategi ini kami anggap efektif karena bisa menjamin keberlanjutan pelayanan meskipun ada kendala teknis,” paparnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Hal ini menunjukkan bahwa desa sangat berhati-hati dalam mengelola data administrasi agar tidak terjadi kehilangan.

Beliau juga menambahkan bahwa evaluasi rutin terhadap penggunaan aplikasi menjadi bagian dari strategi. “Kami selalu mengevaluasi bagaimana kinerja aplikasi ini dalam mendukung pelayanan, termasuk jika ada masukan dari perangkat desa. Dengan evaluasi, kami bisa memperbaiki hal-hal kecil agar ke depannya lebih lancar. Jadi selain mengandalkan sistem yang ada, kami juga tetap memperhatikan faktor teknis dan kesiapan perangkat desa dalam menggunakannya,” jelas Kepala Desa (Wawancara 25 Agustus 2025). Menurutnya, keberhasilan penggunaan E-Buddy tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kedisiplinan pengguna di tingkat desa.



Gambar 5 Diskusi Internal Perangkat Desa Keper Sebagai Bagian Dari Evaluasi

Sumber: Pemerintah Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo (2024)

Gambar tersebut menunjukkan kegiatan koordinasi dan diskusi antara Kepala Desa dan perangkat desa dalam rangka evaluasi penggunaan aplikasi E-Buddy. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi kepemimpinan yang menekankan pentingnya komunikasi internal dan penguatan pemahaman teknis di tingkat perangkat desa. Melalui forum koordinasi seperti ini, kepala desa tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pengarah dan fasilitator dalam memastikan implementasi digitalisasi administrasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Diskusi yang dilakukan mencerminkan adanya proses evaluasi rutin terhadap kinerja sistem, sekaligus sebagai ruang untuk menyampaikan kendala teknis maupun masukan dari perangkat desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa keberhasilan penggunaan E-Buddy tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan dan kedisiplinan sumber daya manusia. Dengan demikian, kegiatan koordinasi tersebut menjadi bukti konkret bahwa strategi digitalisasi di Desa Keper dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan.

Terkait dengan rencana pengembangan lebih lanjut, Kepala Desa menyampaikan bahwa saat ini belum ada program khusus dari desa. “Untuk integrasi aplikasi lain, kami menunggu arahan lebih lanjut dari pihak kabupaten. Jadi untuk sementara, fokus kami adalah memaksimalkan penggunaan E-Buddy agar berjalan sesuai harapan,” jelasnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Beliau menilai bahwa desa memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengembangkan aplikasi secara mandiri karena regulasi tetap berada di tingkat kabupaten.

Namun, beliau tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan ke depan jika kabupaten memberikan kebijakan baru. “Kalau nanti ada instruksi atau inovasi dari kabupaten, kami tentu siap menyesuaikan dan mendukung. Pada dasarnya, desa selalu terbuka dengan hal-hal baru yang bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi, meskipun sekarang belum ada pengembangan lain, kami tetap berharap ke depan ada sistem integrasi yang lebih baik,” tambahnya (Wawancara 25 Agustus 2025). Hal ini menunjukkan sikap terbuka desa terhadap kemajuan teknologi.

Dari uraian wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Keper menaruh perhatian besar pada pentingnya digitalisasi melalui aplikasi E-Buddy. Pandangan beliau menekankan bahwa digitalisasi adalah kebutuhan nyata untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan. Strategi yang dijalankan desa mencakup penggunaan backup manual, arsip komputer, serta evaluasi rutin untuk memastikan keberlanjutan pelayanan. Meski belum ada rencana pengembangan mandiri, desa tetap menunggu arahan dari kabupaten dan siap beradaptasi dengan inovasi yang akan datang. Dengan demikian, kepemimpinan kepala desa menunjukkan arah yang jelas dalam

mengoptimalkan teknologi untuk administrasi desa.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi aplikasi E-Buddy dalam pengelolaan surat masuk di Desa Keper menunjukkan bahwa pada indikator infrastruktur data, sistem telah mampu mengelola surat masuk, surat keluar, dan disposisi secara terdokumentasi serta didukung arsip cadangan sebagai langkah antisipatif. Pada infrastruktur legal, penerapan aplikasi memiliki landasan hukum yang jelas melalui regulasi nasional dan Peraturan Bupati Sidoarjo, meskipun desa belum memiliki SOP internal tersendiri dan masih mengacu pada kebijakan kabupaten. Dari sisi infrastruktur institusional, struktur organisasi dan pembagian tugas telah berjalan terkoordinasi dengan operator sebagai pengelola utama dan pimpinan desa sebagai pengambil keputusan disposisi. Pada infrastruktur manusia, perangkat desa telah memperoleh pelatihan dan mampu mengoperasikan aplikasi, namun masih terdapat ketergantungan pada satu operator sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan ketika yang bersangkutan tidak hadir. Sementara itu, infrastruktur teknologi tergolong memadai dengan dukungan komputer, laptop, printer, dan jaringan internet, walaupun sesekali terjadi gangguan jaringan atau server dari kabupaten. Terakhir, pada indikator strategi pemikiran dan kepemimpinan, kepala desa menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi administrasi dengan menerapkan evaluasi rutin dan sistem cadangan manual sebagai bentuk kehati-hatian, sehingga secara keseluruhan implementasi E-Buddy di Desa Keper telah berjalan baik meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pembagian SDM dan pengembangan kebijakan internal.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama penelitian mengenai implementasi aplikasi E-Buddy di Desa Keper. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Pemerintah Desa Keper, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Kaur Tata Usaha dan Umum, yang telah meluangkan waktu, menyediakan data, dan bersedia menjadi narasumber dalam wawancara, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selain itu, penulis juga menghargai seluruh perangkat desa dan staf administrasi Desa Keper yang turut membantu proses pengumpulan data serta memberikan akses informasi yang diperlukan. Kerjasama, keterbukaan, dan dukungan dari semua pihak tersebut menjadi faktor penting bagi kelancaran penelitian ini. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan administrasi digital di tingkat desa dan menjadi referensi bermanfaat bagi penelitian berikutnya.

#### REFERENSI

- [1] B. Suprianto, "Literature review: penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, vol. 8, no. 2, pp. 123–128, 2023.
- [2] S. Syamsir and N. Saputra, *Administrasi kepegawaian*. CV. Eureka Media Aksara, 2022.
- [3] Y. E. Rachmad *et al.*, *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- [4] L. Choirunnisa, T. H. C. Oktaviana, A. A. Ridlo, and E. I. Rohmah, "Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, vol. 3, no. 1, pp. 71–95, 2023.
- [5] R. Ramadhani, M. Abdillah, I. Santoso, Y. Destrio, D. Hadi, and A. Maulana, "Inovasi E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pelayanan Publik: Studi Kasus Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember," *Interelasi Humaniora*, vol. 1, no. 2, pp. 62–79, 2024.
- [6] S. Sumardi, A. Nawir, and S. Mukhlis, "Analisis Transformasi Birokrasi Melalui Pengembangan e-Government di Indonesia," *Journal of Government Insight*, vol. 1, no. 2, pp. 84–91, 2021.
- [7] H. M. H. M. Zein and S. Septiani, *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- [8] A. Pujilestari and I. R. Maksum, "Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Niara*, vol. 15, no. 2, pp. 211–220, 2022.
- [9] N. S. Maisaroh and I. Rodyah, "Implementation of the Electronic Service Manuscript Application Program (e-buddy) in the Prasung Village Government, Buduran District, Sidoarjo Regency [Implementasi Program Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (e-buddy) Di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten]," 2023.
- [10] R. Yaya and S. Sukardi, "Pengaruh Implementasi E-Government dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Good Government Governance sebagai Variabel Pemoderasi," *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol. 10, no. 1, pp. 69–81, 2025.
- [11] D. I. Nadila and I. U. Choiriyah, "Implementation of E-Government Through E-Buddy in Sidoarjo Regency: Penerapan E-Government Melalui E-Buddy di Kabupaten Sidoarjo," *Indonesian Journal of Public Policy Review*, vol. 25, no. 1, pp. 10–21070, 2024.
- [12] S. T. Mulyoto and D. A. Utami, "Analisis Aplikasi E-Buddy Pada Pengelolaan Arsip Surat Masuk (Studi Pada Dinas

- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo),” *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, vol. 1, no. 1, pp. 85–99, 2023.
- [13] A. Hanifah and I. Rodiyah, “Implementasi Penataan Naskah Dinas Elektronik Melalui E Buddy di Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,” pp. 1–12, n.d.
- [14] R. D. Rahmawati and I. U. Choiriyah, “Implementation of the E-Buddy Application in Managing Official Letters in Village Government (Case Study in Kalisogo Pond Village Government, Jabon District, Sidoarjo Regency),” pp. 1–16, n.d.
- [15] R. E. Indrajit, *Buku Pintar Linux: Membangun Aplikasi eGovernment*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002.
- [16] M. Huberman and M. B. Miles, *The qualitative researcher’s companion*. sage, 2002.

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*